



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT " DAMPIT "

Jl. Sumber Kembar 8 - B Telp. (0341) 896256 - 896458

DAMPIT 65181 - MALANG

email : ptbprdampit01@gmail.com Website www.bprdampit.co.id

Dampit, 31 Januari 2024

No. : 008/BD/Perbarindo/I/2024

Lamp : -

Hal : **Pelaporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT.BPR DAMPIT Tahun 2023**

Kepada Yth,

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perbarindo dan Media BPR

KOMP. PATRA II NO. 46 Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass

RT.15/RW.3, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih

DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan **Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023.**

Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya.

Hormat kami



FX. SUWOKO.S.ab

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Dampit

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665626-2-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600898-31012024093934

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

ptbpr_dampit@ymail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

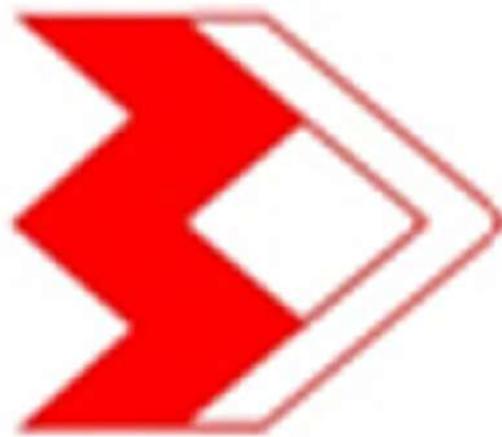
Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 09:39:34



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR DAMPIT
TAHUN 2023**



**Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit
TELEPON: (0341) 896256, 896458**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Akte Pendirian No: 99 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat dihadapan notaris Abdurachim,Sarjana Hukum,Notaris di Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2.4481.HT.01.01 tanggal 17 April 1989 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan,terakhir No.126 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dibuat dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja,Sarjana Hukum,di Surabaya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0155967 tanggal 25 Agustus 2023 Kegiatan usaha PT BR DAMPIT dari dulu hingga sekarang masih tetap berada di JL Sumber Kembar No.8b Dampit-Malang.Izin usaha diberikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: KEP.142/KM.13/1989. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Dampit pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 BPR Dampit memiliki komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh OJK sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Malang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Dampit didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Ditahun 2023 dan untuk tahun mendatang, BPR Dampit terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten danberkelanjutan



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Endang Poncowati,SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin dan Mengurus perusahaan; mengelola jalannya usaha sesuai dengan tujuan perusahaan, mengelola aset "PT BPR Dampit" untuk maksud tujuan dan kepentingan "PT BPR Dampit", sesuai tata kelola usaha yang baik agar dipercaya stakeholder, sehingga bisa menunjukkan performa yang bagus dan terus berkembang.2. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3. Manajemen risiko. Sesuai asas independensi dalam penerapan GCG, maka fungsi manajemen risiko harus dipastikan telah beroperasi secara independen tanpa intervensi.4. Melakukan monitoring dan meningkatkan kinerja kantor secara keseluruhan baik dari segi penyaluran kredit,tabungan maupun deposito5. Mengatur dan memutuskan segala tindakan untuk menjaga seluruh aset perusahaan6. Memperhatikan,menilai dan disiplin , motivasi kerja dan loyalitas para karyawan7. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada seluruh karyawan baik dari segi sikap maupun bahasa,dll		
2.	Nama	:	Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">1. Mengawasi dan mengkoordinasi kepada seluruh karyawan/i2. Manajemen risiko kredit,operasional,kepatuhan dan likuiditas3. Menerapkan dan menyiapkan pedoman program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme4. Mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan secara keseluruhan5. Mengevaluasi dan menyusun rencana bisnis bank6. Menyempurnakan sistem dan prosedur ,pengaturan ,pembukuan ,tugas- tugas dan tanggungjawab masing-masing karyawan7. Memastikan fungsi kepatuhan berjalan dengan lancar8. Memeriksa dan melaporkan laporan tata kelola dan hasil penilaian sendiri (self assesment)9. Melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi penyimpangan intern		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<ol style="list-style-type: none">a. Direksi telah menjaga dan memonitoring Tingkat Kesehatan Bank dalam posisi sehat.b. Direksi telah memberikan tindakan tegas kepada karyawan yang melanggar peraturan .c. Untuk pertumbuhan kredit akan lebih ditingkatkan lagi meskipun belum maksimal.d. Meningkatkan penagihan kredit bermasalah telah dilakukan untuk menyehatkan kualitas kredit.			



Penjelasan Lebih Lanjut :
-

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Erlyani,SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di BPR2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di BPR3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.5. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di BPR2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di BPR3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.5. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi Sehat.c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlakud. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan temuan pemeriksaan OJK juga mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
-			



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak memiliki Komite Audit ,Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi namun di BPR Dampit memiliki PE Audit dan PE Manajemen Risiko,PE Kepatuhan ,PE APU&PPT (dirangkap dengan jabatan accounting)	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-



3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Endang Poncowati,SE	Rp0	0%
2.	Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi di BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Endang Poncowati,SE	-	-	0%
2.	Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Endang Poncowati,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



2.	Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Endang Poncowati,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Fransiskus Xaverius Suwoko, S.ab	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Erlyani,SE	Rp0	0%
2.	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Erlyani,SE	-	-	0%
2.	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR



1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Erlyani,SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Erlyani,SE	Tidak ada	Tidak ada	Kentjana Widjaja - Keponakan
2.	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Terdapat Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp134.756.000	2	Rp117.600.000
2.	Tunjangan	2	Rp12.600.000	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp6.500.000	2	Rp4.500.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp17.866.000	2	Rp9.800.000
Total			Rp171.722.000		Rp131.900.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai RUPS					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1), BPJS Ketenagakerjaan (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	5.6 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.8 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 April 2023	2	1. Posisi pinjaman selama Triwulan I tahun 2023 mengalami pertumbuhan dan sudah mencapai target ,namun posisi tersebut agar terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan kembali 2. Prosentase NPL posisi triwulan I dibawah budget namun dari sisi volume mengalami peningkatan



PT BPR DAMPIT

Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit

Telepon: (0341) 896256, 896458

Website: www.bprdampit.co.id. Email: ptbprdampit01@gmail.com

			yang disebabkan karena naiknya kolektibilitas dari DPK menjadi KL . 3. Pembuatan analisa diproposal agar lebih detail dan jelas
2.	21 Juli 2023	2	1. BPR belum bisa memaksimalkan dana simpanan yang idle, sehingga ditempatkan pada bank lain cukup besar 2. NPL belum berhasil di maksimalkan , agar segera dibuatkan rencana tindak terhadap penyelesaiannya 3. Dengan adanya tambahan modal maka kesempatan BPR untuk lebih mempercepat pertumbuhan kredit 4. Untuk penambahan tenaga marketing baru agar diusahakan kembali untuk memperluas dan mempercepat pelemparan kreditnya
3.	15 November 2023	2	1. Team marketing agar tetap fokus dalam mencari nasabah baru dengan cara membuka pasar-pasar yang disesuaikan dengan kapasitas usaha BPR 2. Penanganan NPL masih kurang terkoordinasi, posisi NPL masih tinggi , untuk kedepannya Direksi dan team marketing agar berupaya dalam posisi Desember 2023 3. Penagihan WO agar lebih ditingkatkan lagi
4.	17 Januari 2024	2	1. Secara umum kinerja PT BPR Dampit sudah memenuhi target, namun khusus pelemparan kredit masih belum ada peningkatan 2. Penempatan pada bank lain masih lumayan banyak dan team marketing belum bisa merealisasikan kredit sehingga pendapatan belum maksimal 3. Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko agar lebih ditingkatkan lagi 4. Agar segera dilakukan updating SOP PT BPR Dampit sesuai dengan ketentuan peraturan OJK yang terbaru 5. Diupayakan segera agar mencari pengganti marketing yang telah keluar.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat telah dihadiri oleh 2 Dewan Komisaris yang diselenggarakan 4 (empat) kali dalam 1 tahun			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Erlyani,SE	4	0	100%
2.	Drs.Ec.Isa Satmokunjtoro	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat dalam 1 tahun dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Dampit.								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat Permasalahan Hukum yang Dihadapi		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Ditahun 2023 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak terdapat Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR DAMPIT
Alamat	: Jl.Sumber Kembar No.8B Dampit
Nomor Telepon	: (0341) 896256, 896458
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp6.406.815.978
Total Aset	: Rp11.889.296.624

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR DAMPIT Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.52	0.304
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.26	0.226
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.30	0.058
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.80	0.135
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.20	0.090
Nilai Komposit			1.8
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.52)

1. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola pasal 4 ayat 2 BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar wajib memiliki paling sedikit 2 orang direksi dan PT BPR Dampit sudah terpenuhi dan anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kabupaten Malang.
2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit maupun temuan OJK yang antara lain :
 - a.) Temuan tentang permintaan sampling debitur kredit bermasalah pembuatan actionplan
 - b.) Update Surat Keputusan Direksi tentang : batas maksimal penyediaan uang tunai kasir dan Update tentang ketentuan tabungan pasif
 - c.) Perubahan tentang SOP Perlindungan Konsumen yang sesuai pada POJK No.22 tahun 2023
3. Setiap bulan BPR telah mengirimkan data secara kualitatif maupun kuantitatif kepada Dewan Komisaris yang meliputi laporan keuangan dan data perkreditan BPR
4. Direksi selalu mengkomunikasikan setiap kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai.
5. Setiap tahun BPR selalu menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, dan Asosiasi BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan dan kedua Dewan komisaris bertempat tinggal di wilayah Surabaya
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatannya.
3. Nasihat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
4. Dewan Komisaris telah memantau tindak lanjut temuan, audit intern dan hasil pengawasan OJK meskipun belum maksimal
5. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan telah dituangkan dalam laporan Pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis Bank
6. Setiap rapat Dewan Komisaris telah dibuatkan risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Dampit tidak memiliki Komite namun hanya memiliki PE Audit, PE Kepatuhan, PE Manajemen Risiko dan PE APU&PPT

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)



PT BPR Dampit sudah menyusun kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode pelaporan PT BPR Dampit tidak pernah terjadi benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.26)

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak pernah terlibat dalam proses penyaluran dana.
2. PT BPR Dampit telah menunjuk PE Kepatuhan namun masih terdapat perangkapan jabatan dengan operasional
3. Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh karyawan BPR
4. PE Kepatuhan selalu memantau kesesuaian kegiatan operasional BPR dengan ketentuan yang berlaku
5. PE Kepatuhan menyusun laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah di tandatangani oleh direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur utama setiap 1 tahun sekali dan dikirim ke OJK
6. PT BPR Dampit tidak pernah ada penyimpangan terhadap peraturan OJK maupun aturan perundang-undangan lainnya maka bagian kepatuhan tidak pernah menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

1. PT BPR Dampit sudah mempunyai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2. PE Audit telah membuat laporan Audit secara berkala yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama
3. PE Audit Intern sudah melaksanakan audit secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dan telah dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama
4. PT BPR Dampit telah mengikutkan PE Audit Intern dalam pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
5. PT BPR Dampit secara berkala setiap 1 tahun sekali telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. PT BPR Dampit selalu menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.3)

1. PT BPR Dampit telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan



Publik (KAP) yang memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

2. PT BPR Dampit telah menunjuk AP & KAP Moh Wildan dan Adi Darmawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3. PT BPR Dampit masih dalam proses audit oleh Auditor Ekstern dibulan Januari 2024.

4. PT BPR Dampit belum menerima Hasil audit dan Management Letter dari Auditor Ekstern.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

1. PT BPR Dampit telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko

2. PT BPR Dampit telah menyusun kebijakan dan prosedur penerapan Manajemen Risiko

3. Dewan Komisaris telah :

a.) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko

b.) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

c.) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

4. PT BPR Dampit telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. PT BPR Dampit telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

1. PT BPR Dampit telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK

termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

2. PT BPR Dampit telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar

3. PT BPR Dampit tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. PT BPR Dampit secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.8)

1. Direksi PT BPR Dampit selalu menyusun laporan Rencana bisnis BPR dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.



2. PT BPR Dampit telah menyusun rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dalam rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dan telah di laporkan ke OJK setiap semester
4. PT BPR Dampit telah melaporkan Rencana Bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

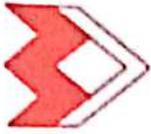
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.2)

1. PT BPR Dampit selalu menyusun dan melaporkan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2. PT BPR Dampit telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. PT BPR Dampit telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Ditahun 2023 struktur organisasi di PT BPR DAMPIT untuk Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah terpenuhi. Sedangkan, Pejabat Eksekutif Kepatuhan,dan Manajemen Risiko sudah ada walaupun masih terdapat perangkapan Jabatan.Proses penerapan tata kelola di BPR DAMPIT berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif . Hasil Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap.Untuk pedoman dan kebijakan selalu diupdate sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. PT BPR Dampit telah menyampaikan kewajiban pelaporan secara tepat waktu kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan juga ke media dan asosiasi BPR.



PT BPR DAMPIT
JI. Sumber Kembar No.8B Dampit
Telepon: (0341) 896256, 896458
Website: www.bprdampit.co.id. Email: ptbprdampit01@gmail.com

Malang, 25 Januari 2024

PT BPR DAMPIT

Mengetahui

Endang Poncowati,SE
Direktur Utama

Menyetujui

Eriyani,SE
Komisaris Utama